

**PROSPEK HUBUNGAN BILATERAL AFGHANISTAN -
AMERIKA SERIKAT PASCA REZIM ASHRAF GHANI**



OLEH:

RINI DWI ARIYANI

E061181522

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL
PROSPEK HUBUNGAN BILATERAL AFGHANISTAN -
AMERIKA SERIKAT PASCA REZIM ASHRAF GHANI

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin*

OLEH:

RINI DWI ARIYANI

E061181522

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PROSPEK HUBUNGAN BILATERAL AFGHANISTAN-AMERIKA SERIKAT PASCA REZIM ASHRAF GHANI

N A M A : RINI DWI ARIYANI

N I M : E061181522

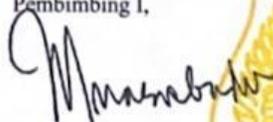
DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 18 Oktober 2022

Mengetahui :

Pembimbing I,



Muh. Nasir Badu S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197312051998021001

Pembimbing II,



Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197602022000122003

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



Dr. H. Farwis MA., Ph.D.
NIP. 196701021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PROSPEK HUBUNGAN BILATERAL AFGHANISTAN-AMERIKA SERIKAT PASCA REZIM ASHRAF GHANI

N A M A : RINI DWI ARIYANI

N I M : E061181522

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 17 Oktober 2022.

TIM EVALUASI

Ketua : Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Dwi Ariyani
NIM : E061181522
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

***“Prospek Hubungan Bilateral Afghanistan - Amerika Serikat Pasca Rezim
Ashraf Ghani”***

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain kecuali kutipan dari ringkasan yang setiap salah satunya telah saya jelaskan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Oktober 2022

Yang Menyatakan:



Rini Dwi Ariyani

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Prospek Hubungan Bilateral Afghanistan-Amerika Serikat Pasca Rezim Ashraf Ghani”** dapat terselesaikan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi ini juga merupakan salah satu bentuk kontribusi penulis sesuai dengan bidang keilmuan dan memberikan informasi terutama berkaitan dengan hubungan bilateral Afghanistan dan Amerika Serikat Pasca rezim Ashraf Ghani.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, serta adanya kendala-kendala yang dialami oleh penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik serta saran yang membangun dari para pembaca tentunya sangat diperlukan agar kedepannya penulis dapat menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi dan juga dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada keluarga besar yang telah banyak memberikan semangat, motivasi, dan juga tidak henti-hentinya mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya terdapat pula berbagai bantuan, doa,

dukungan, nasihat, maupun motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta jajarannya.
2. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak H. Darwis, MA, Ph.D.
3. Bapak Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D selaku dosen pembimbing I dan Ibu Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional tanpa terkecuali yang telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung dan juga seluruh staff Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang telah membantu penulis dalam mengurus berkas akademik selama proses perkuliahan berlangsung hingga turut membantu dalam persiapan ujian penulis.
5. Kedua orang tua penulis, Mapparenta, S.Sos dan Nurmiyati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Saudara-saudara kandung penulis, Marina Safitri dan Ririn Vira Utami serta keponakan penulis Zahid Hamizan yang selalu mendukung, menghibur, serta mewarnai hari-hari penulis terutama selama penyusunan skripsi ini.
7. Iqbal Dwi Wahyulianto yang selalu memberikan dukungan, motivasi, waktu dan juga bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah menjadi pendengar yang baik atas segala keluh kesah yang dirasakan penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Jantung, sahabat-sahabat seperjuangan penulis selama masa perkuliahan Wafiqah Azzahrah Farid, Dwiyana Aulia, dan Nurul Annisa yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
9. Rekan-rekan Reformasi 2018 yang ikut membantu penulis selama proses perkuliahan berlangsung, terkhusus Andi Wingky Septiawanda, yang selalu memberikan dukungan serta banyak bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Sobat Remes, Sri Rahmayani Umar, Reski Nur Amelia, Nurhilda Nurdin, Nur Anisa Sakka, Nadiah, dan Sri Mulia Nasir yang selalu memberikan dukungan, bantuan, serta semangat kepada penulis mulai saat penulis masuk ke dunia perkuliahan hingga saat ini.

Penulis mengucapkan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Semoga kedepannya penulis dapat tetap berkontribusi dan menghasilkan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya. Akhir kata penulis kembali mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Makassar, 4 Oktober 2022

Penulis

ABSTRAK

Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Afghanistan telah terjalin sejak tahun 1921. Hubungan yang terjalin antara keduanya berasal dari bantuan Amerika Serikat untuk Afghanistan dalam mengusir Uni Soviet dari negaranya. Hubungan antara keduanya terus berlanjut pasca terjadinya peristiwa 9/11 yang menjadikan Amerika Serikat berfokus untuk membantu Afghanistan dari gangguan kelompok pemberontak di negaranya, yakni Taliban. Namun, pada tahun 2021 lalu, pemerintahan Afghanistan jatuh ke tangan Taliban yang kemudian memberikan pengaruh besar terhadap Afghanistan dan juga hubungannya dengan Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hubungan antara Amerika Serikat dan Afghanistan pasca rezim Ashraf Ghani serta mengidentifikasi dan menganalisis peluang dan tantangan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Afghanistan pada masa pemerintahan Taliban di Afghanistan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data tinjauan pustaka dari berbagai sumber kredibel, seperti jurnal, buku, situs daring, dan lainnya untuk menggambarkan hubungan bilateral Afghanistan dan Amerika Serikat serta peluang dan tantangan dalam membangun hubungan bilateral kedua negara pasca rezim Ashraf Ghani. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep hubungan bilateral dan kepentingan nasional. Alasan penulis menggunakan konsep ini untuk menganalisis mengenai bagaimana proses dan prospek hubungan bilateral yang terjadi antara Afghanistan dan Amerika Serikat di masa pemerintahan Taliban. Adapun hasil dari penelitian ini yakni adanya kepentingan nasional yang dipegang oleh Amerika Serikat dan Afghanistan sehingga menjadi peluang bagi kedua negara ini untuk membentuk suatu hubungan bilateral. Akan tetapi, ada banyak tantangan yang dihadapi keduanya dalam membangun hubungan bilateralnya pasca pemerintahan Ashraf Ghani, yakni perbedaan kualitas dan kuantitas kedua negara, optimalisasi kapabilitas dalam mencapai kepentingan nasional, ancaman hubungan bilateral, ketergantungan Afghanistan terhadap Amerika Serikat, dan perbedaan kondisi pemerintahan antara Amerika Serikat dan Afghanistan.

Kata Kunci: Hubungan Bilateral, Amerika Serikat, Afghanistan, Peluang, Tantangan

ABSTRACT

Bilateral relations between the United States and Afghanistan have existed since 1921. The relationship between the two stems from the United States' assistance to Afghanistan in expelling the Soviet Union from the country. Relations between the two continued after the events of 9/11 which made the United States focus on helping Afghanistan from the interference of the insurgent group in its country, namely the Taliban. However, in 2021 ago, the Afghan government fell into the hands of the Taliban who then exerted great influence on Afghanistan and also its relations with the United States. The purpose of this study is to look at the relationship between the United States and Afghanistan after the Ashraf Ghani regime and to identify and analyze the opportunities and challenges of bilateral relations between the United States and Afghanistan during the reign of the Taliban in Afghanistan. The research method used in writing this thesis is a descriptive qualitative research type using literature review data collection techniques from various credible sources, such as journals, books, online sites, and others to describe bilateral relations between Afghanistan and the United States as well as the opportunities and challenges in building relations. bilateral relations between the two countries after the Ashraf Ghani regime. In this study, the author uses the concept of bilateral relations and national interests. The reason the author uses this concept is to analyze the process and prospects of bilateral relations between Afghanistan and the United States during the reign of the Taliban. The results of this study are the existence of national interests held by the United States and Afghanistan so that it becomes an opportunity for these two countries to form a bilateral relationship. However, there are many challenges faced by the two in building their bilateral relationship after the Ashraf Ghani administration, namely differences in quality and quantity of the two countries, optimization of capabilities in achieving national interests, threats to bilateral relations, Afghanistan's dependence on the United States, and differences in government conditions between the United States and Afghanistan.

Keywords: Bilateral Relations, United States of America, Afghanistan, Opportunities, Challenges

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	10
D. Kerangka Konseptual	10
1. Konsep Hubungan Bilateral	11
2. Konsep Kepentingan Nasional.....	12
E. Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian	14
2. Teknik Pengumpulan Data.....	15
3. Teknik Analisis Data.....	15
4. Metode Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Konsep Hubungan Bilateral	16
B. Konsep Kepentingan Nasional	23
BAB III GAMBARAN UMUM	29
A. Sejarah dan Perkembangan Hubungan Bilateral Afghanistan – Amerika Serikat	29
B. Kepemimpinan dan Kebijakan luar Negeri Amerika Serikat dan Afghanistan	42
BAB IV PROSPEK HUBUNGAN BILATERAL AFGHANISTAN-AMERIKA SERIKAT PASCA REZIM ASHRAF GHANI	55
A. Peluang Hubungan Bilateral Afghanistan-Amerika Serikat Pasca Rezim Ashraf Ghani	55
B. Tantangan Hubungan Bilateral Afghanistan-Amerika Serikat Pasca Rezim Ashraf Ghani	62
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat kepada Afghanistan	37
Gambar 2 Rute Proyek Pipeline Strategy Framework di Afghanistan	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hubungan internasional, interaksi antar aktor internasional menjadi sebuah hal yang mutlak dilakukan baik berupa aktor negara maupun non negara. Sebagai bagian dari ilmu sosial, hubungan internasional membahas mengenai tentang peristiwa internasional yang dengan sendirinya fokus kajian, metode dan teorinya pun berubah-ubah dengan cepat sesuai dengan perkembangan terbaru peristiwa internasional (Hadiwinata, 2017). Perilaku tersebut pun didukung oleh banyak hal, baik dari kondisi eksternal berupa politik internasional, dinamika kawasan, dan fenomena globalisasi maupun dari kondisi internal aktor tersebut seperti politik luar negeri, kepentingan suatu aktor dan sejenisnya.

Dalam konteks interaksi antar negara, hal tersebut dikonseptualisasikan sebagai hubungan bilateral antar negara. Menurut Budiono Kusumohamidjojo hubungan bilateral merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara baik yang berdekatan secara geografis hingga yang jauh disebrang lautan yang bertujuan untuk menciptakan kerjasama politik, struktur ekonomi, serta kebudayaan (Kelvin, 2019). Bentuk dari hubungan bilateral pun dapat berupa banyak hal seperti perjanjian kerjasama, kunjungan antar negara dan sebagainya dan hal tersebut

berlaku bagi negara-negara yang telah memiliki hubungan bilateral dengan negara lain, salah satunya adalah Afganistan dan Amerika Serikat.

Secara geografis, Afganistan dan Amerika Serikat memiliki profil geografis yang berbeda. Afganistan secara geografis berada di kawasan Asia Tengah yang mana kawasan Asia Tengah membentang dari barat yaitu Laut Kaspia sampai di timur yaitu Cina, serta dari Afghanistan di berada di selatan hingga Rusia di utara dan juga Laut Kaspia yang berada di barat sampai Cina di timur, sedangkan Amerika Serikat berada di wilayah Amerika Utara dengan luas wilayah $\pm 24.500.000 \text{ km}^2$ yang terbentang dari Kutub Utara ke selatan sampai dengan Jazirah Florida dan dari Samudra Pasifik ke timur sampai Samudra Atlantik, mencakup bagian utara Meksiko, Teluk Meksiko, daratan Amerika Serikat, Kanada, dan Kepulauan Arktik (Kuspriyanto, 2020). Dengan perbedaan wilayah dari kedua negara tersebut tentu akan mempengaruhi pula kebutuhan dan kepentingan nasional mereka masing-masing.

Secara historis, hubungan diantara kedua negara tersebut telah terbangun sejak lama. Pada tahun 1921, Amerika Serikat mengakui Afghanistan setelah kunjungan resmi ke Gedung Putih oleh delegasi Afghanistan yang dipimpin Jenderal Wali Mohammad Khan. Pertukaran serangkaian misi resmi dan korespondensi tersebut pada akhirnya menghasilkan pembentukan hubungan diplomatik penuh antara kedua negara pada tahun 1934 (The Embassy of Afghanistan, 2022). Hal tersebut pun

berlanjut hingga menjadikan hubungan kedua negara menjadi lebih insentif kedepannya. Hubungan tersebut kemudian terus berkembang hingga memasuki era perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat.

Pada periode ini, upaya perebutan kekuasaan dan konflik pemerintah dan kelompok pemberontak berubah menjadi perang perebutan pengaruh antara blok Barat dan Timur. Pengiriman pasukan lintas udara dan pasukan khusus Spetsnaz mengawali upaya intervensi Uni Soviet untuk mempertahankan pemerintahan Afghanistan yang berada di ambang keruntuhan (Tanner, 2002). Selain Amerika Serikat, sebelumnya Afghanistan pernah berhubungan baik dengan Uni Soviet dimana kedua negara tersebut menandatangani *Treaty of Friendship* agar sama-sama berposisi setara dan netral. Namun pada tahun 1973, terjadi kudeta di Afghanistan yang pada akhirnya menggulingkan pemerintahan yang menganut sistem monarki yang juga menjadi dasar berdirinya Republik Afghanistan (Iswara, 2021). Alasan Muhammad Daoud yang pada saat itu menjabat sebagai pemimpin Afghanistan menggantikan pemimpin sebelumnya yaitu ingin merubah sistem pemerintahan monarki ke pemerintahan yang lebih modern dan bebas.

Pemerintahan Afghanistan yang sebelumnya condong ke Uni Soviet kemudian berubah dikarenakan adanya perubahan haluan pemerintahan hingga akhirnya Uni Soviet menyadari perubahan tersebut dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap pengaruhnya di Afghanistan dan

pada tahun 1979 pasukan Uni Soviet menyerbu Afghanistan untuk mendukung pemerintahan berhaluan komunis (Iswara, 2021). Dengan invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet, tentu membuat Amerika Serikat untuk turut membantu dan terlibat dalam perang Afghanistan sebab Uni Soviet adalah rival Amerika Serikat di masa perang dingin.

Sebelumnya, sejak April 1978, AS telah menempatkan Adolph Dubs sebagai duta besar di Afghanistan. Selama menjabat sebagai duta besar AS di Afghanistan, Adolph Dubs banyak menjalani hubungan dengan Nur Muhammad Taraki yang merupakan pemimpin Afghanistan setelah Daud Khan yang bertujuan untuk menangkalkan pengaruh Uni Soviet di Afghanistan, hingga berakhir pada peristiwa penculikan dan pembunuhan dirinya oleh pemberontak syiah di Afghanistan (Office of the Historian, 2022). Selain itu, dalam membantu para kelompok mujahidin dalam melawan pengaruh Uni Soviet, AS juga aktif dalam mengirimkan bantuan seperti alat-alat komunikasi dan bantuan kemanusiaan bagi para kelompok tersebut (Hidayat, 2018). Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai bentuk hubungan bilateral yang telah terjalin antara Amerika dan Afghanistan.

Selain mengirimkan bantuan kemanusiaan dan alat-alat komunikasi bagi para kelompok mujahidin, AS juga melancarkan sebuah operasi yang diberi nama *Operation Cyclone* yang juga merupakan operasi pertama AS di Afghanistan dan bertujuan menimbulkan kerugian sebesar-besarnya bagi Uni

Soviet dengan cara membantu menyediakan persenjataan dan biaya bagi kelompok mujahidin selama berperang melawan Uni Soviet (Kraskiewicz, 2012). Selain AS, kelompok mujahidin juga mendapatkan dukungan dari beberapa negara seperti Pakistan, China, Arab Saudi serta beberapa negara lain. Karena semakin kuat dukungan yang diberikan kepada kelompok mujahidin dalam berperang, Uni Soviet pada akhirnya memutuskan untuk menyerah dan menarik pasukannya pada tahun 1989 (Iswara, 2021). Pasca insiden tersebut, hubungan antara Afghanistan dan Amerika semakin meningkat karena AS memiliki keterlibatan yang besar dalam perang melawan Uni Soviet.

Di lain sisi pasca kepergian Uni Soviet, pengaruh komunis pun belum mampu dihilangkan di Afghanistan. Hal tersebut dapat terealisasi pada tahun 1992 dimana kelompok mujahidin yang dipimpin oleh Syah Mas'ud berhasil mengubur sistem sosialisme Uni Soviet di Afghanistan yang ditandai dengan tumbangannya pemerintahan Najibullah dan naiknya pemerintahan Burhanuddin di bawah naungan mujahidin (Fahrani, 2020). Namun, perubahan kepemimpinan hanya menambah masalah internal Afghanistan yang kemudian melahirkan kelompok Taliban. Kelompok Taliban sendiri merujuk pada anggota kelompok yang pernah belajar di bawah Mullah Omar, yang merupakan komandan pasukan Mujahidin pada masa perang melawan Uni Soviet yang kemudian menjadi salah satu pendiri dari kelompok Taliban

(Iswara, 2021). Kelompok Taliban sendiri pada awalnya terbentuk dari perpecahan beberapa kelompok besar Mujahidin yang berbeda pendapat dan akhirnya saling memperebutkan kekuasaan.

Sehubungan dengan kepemimpinan Taliban di Afghanistan yang telah berjalan selama beberapa tahun, Amerika Serikat sendiri telah mengalami tragedi serangan terorisme terburuk yang dikenal dengan peristiwa 9/11 pada tahun 2001. Penyebab tragedi tersebut adalah serangan Al-Qaeda yang menghancurkan gedung kembar *World Trade Center* (WTC) dan Pentagon. Menanggapi serangan tersebut Amerika Serikat kemudian membentuk kebijakan *Global War on Terror* yang menjadi legalitas Amerika Serikat dalam memburu kelompok Al-Qaeda dan juga pemimpinnya yaitu Osama Bin Laden dimana Al-Qaeda berlindung di Afganistan dibawah rezim Taliban (Payani, 2016). Mengetahui hal tersebut, Amerika Serikat kemudian memberikan ultimatum untuk menyerahkan kelompok Al-Qaeda kepada Amerika Serikat. Namun permintaan tersebut mendapat penolakan oleh Taliban. Amerika Serikat dibawah pimpinan Bush kemudian mengeluarkan wacana “*either you are with us, or you are with the terrorist*” yang merupakan peringatan kepada Taliban dan juga secara tidak langsung memberikan pilihan kepada dunia internasional untuk memilih berperang melawan terorisme bersama Amerika Serikat atau mendukung aksi terorisme yang dapat mengancam keamanan dunia (Annabel Van Gestel, 2018). Amerika Serikat

mengaktualisasikan kapabilitas untuk memerangi kelompok Al-Qaeda maupun Taliban. Hal ini dapat diamati melalui operasi militer yang telah dilaksanakan 18 tahun di Afganistan.

Pada tahun 2002, pasca jatuhnya rezim Taliban dan pembentukan Administrasi Sementara di Afghanistan, kedutaan besar dibuka kembali dan hubungan dipulihkan. Sejak itu, kedua negara telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis sepuluh tahun untuk perdamaian dan pertumbuhan ekonomi, serta Perjanjian Keamanan Bilateral untuk memperkuat pasukan keamanan Afghanistan (The Embassy of Afghanistan, 2022). Dengan perjanjian tersebut, pertumbuhan ekonomi serta kestabilan politik diharapkan dapat terealisasi dengan lebih mudah di negara Afghanistan.

Selain itu, PBB melaksanakan konferensi internasional di Bonn Jerman dengan pemimpin anti Taliban (Aliansi Utara) pada Desember 2001. Konferensi tersebut bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi Afghanistan dan membentuk pemerintahan interim pasca mundurnya pemerintahan Taliban. Di bawah Perjanjian Bonn, Loya Jirga atau Dewan Perwakilan bertugas untuk menyiapkan pemerintahan transisi. Hamid Karzai menjabat Ketua Pemerintahan Transisi pada 22 Desember 2001 dan Presiden sementara (interim) pada Juli 2002. Dimana dalam kepemimpinan Hamid Karzai, Afghanistan mampu menunjukkan eksistensinya dalam hubungan

internasional. Sementara itu, hubungan Afghanistan dengan *North Atlantic treaty Organization* (NATO) dan Amerika Serikat semakin membaik pada masa kepresidenan Hamid Karzai (Maka, 2017). Perekonomian pada masa pemerintahan Karzai semakin menguat setelah sekian lama dalam kondisi terpuruk. Pemasukan negara meningkat tiap tahunnya meskipun masih mengandalkan bantuan asing.

Memasuki pemerintahan Afghanistan selanjutnya yaitu Ashraf Ghani, kondisi pemerintahan Afghanistan memasuki babak baru. Pasalnya dalam masa kepemimpinannya, Amerika Serikat menarik pasukannya di Afghanistan. Penarikan pasukan AS telah diikuti *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan sekutu AS lainnya di Afghanistan, yakni Australia. Sedangkan Jerman sudah menarik militer jauh sebelumnya. Penarikan seluruh pasukan AS ini menandai berakhirnya kehadiran pasukan negara adidaya itu di bumi Afghanistan setelah hampir 20 tahun beroperasi menghancurkan rezim Taliban pasca-9/11, karena dinilai berkolusi dalam serangan Al-Qaeda tersebut (Nainggolan, 2021). Penarikan militer tersebut kemudian menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi Afghanistan yang sebelumnya telah memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat dalam menghentikan ambisi Taliban di Afghanistan.

Dengan hadirnya Taliban sebagai penguasa baru di Afghanistan, tentu saja akan mempengaruhi hubungan bilateral Afghanistan dengan negara

lainnya termasuk Amerika Serikat. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis lebih jauh mengenai Prospek Hubungan Bilateral Afghanistan – Amerika Serikat Pasca Rezim Ashraf Ghani. Melihat bagaimana alasan Amerika Serikat untuk menginvasi Afghanistan adalah untuk mengatasi Taliban, maka dengan hadirnya Taliban sebagai penguasa baru di Afganistan tentu menjadi topik yang menarik untuk dikaji oleh penulis dalam melihat prospek hubungan bilateral kedua negara tersebut.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah yang diangkat oleh penulis ialah penulis perkembangan hubungan bilateral Afghanistan - Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Taliban di Afghanistan dan kepemimpinan Joe Biden di Amerika Serikat yang berlangsung sejak tahun 2021. Sebagaimana pembahasan yang penulis telah uraikan dalam latar belakang maka rumusan masalah yang diangkat penulis, yaitu :

- a. Bagaimana peluang hubungan bilateral Afghanistan – Amerika Serikat pasca rezim Ashraf Ghani?
- b. Bagaimana tantangan hubungan bilateral Afghanistan – Amerika Serikat pasca rezim Ashraf Ghani?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut.

- a) Untuk mengidentifikasi peluang dalam hubungan bilateral Afghanistan – Amerika Serikat pasca rezim Ashraf Ghani.
- b) Untuk menganalisis tantangan dalam hubungan bilateral Afghanistan – Amerika Serikat pasca rezim Ashraf Ghani

Adapun kegunaan penulisan yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut.

- a) Bagi Pemerhati isu-isu Timur Tengah, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman terkait prospek hubungan bilateral Afghanistan – Amerika Serikat pasca rezim Ashraf Ghani.
- b) Bagi Akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang membahas prospek hubungan bilateral Afghanistan – Amerika Serikat pasca rezim Ashraf Ghani

D. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan Konsep hubungan bilateral dan konsep kepentingan nasional.

1. Konsep Hubungan Bilateral

Dalam memahami konsep hubungan bilateral, Budiono Kusumohamidjojo menyatakan hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara dua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh disebrang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan kerjasama politik, kebudayaan dan struktur ekonomi (Kelvin, 2019). Dalam artian bahwa bagaimanapun jarak diantar kedua negara, apabila suatu negara ingin menciptakan suatu hubungan tertentu dengan negara lain dan berkesinambungan maka hal tersebut telah dinamakan sebagai hubungan bilateral.

Menurut Ludwig, hubungan bilateral tidak lagi dipahami sebagai interaksi antar negara (terwujud) tetapi mengikuti ontologi relasional yang dinamis sebagai proses transaksi yang berkelanjutan di antara bagian-bagian dari sistem sosial yang kompleks. Masing-masing terdiri dari subsistem, dari dua aktor kolektif hingga individu. Selain itu, sistem bilateral tumpang tindih dengan dan tertanam dalam keragaman sistem sosial dan alam lainnya (Ludwig, 2021). Dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral tidak lagi dapat dipandang sebatas interaksi antar Negara namun dapat dilihat sebagai sebuah sistem sosial yang kompleks.

Dengan adanya hubungan bilateral yang terjalin antar negara, maka akan melahirkan kerjasama internasional. Menurut Bagaskara, kerjasama

internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk memenuhi kepentingan negara-negara di dunia (Bagaskara, 2018). Oleh karena itu, semakin baik hubungan bilateral yang terjalin oleh suatu Negara maka tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama internasional dapat berjalan dengan lebih baik kedepannya dimana kerjasama internasional dapat berupa kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.

Penulis menggunakan konsep ini untuk menganalisis bagaimana proses dan prospek hubungan bilateral yang terjadi antara Afghanistan dan Amerika Serikat di masa pemerintahan Taliban.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah konsep utama dalam hubungan internasional. Semua bangsa selalu terlibat dalam proses memenuhi atau mengamankan tujuan kepentingan nasional mereka. Ini adalah hak yang diterima secara universal dari setiap negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya (Suwarman et al., 2018). Alasan dibalik kebijakan luar negeri suatu negara adalah hanya kepentingan nasional yang ingin dicapai, baik melalui cara yang sifatnya konstruktif maupun desktruktif.

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum Negara untuk melindungi serta mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan Negara lain. Dari tinjauan

tersebut para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik (Pandapotan, 2019). Dalam teori kepentingan nasional, Morgenthau menjelaskan bahwa suatu negara harus memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kepentingan nasional negaranya, dimana dalam memenuhi kepentingan tersebut suatu negara harus mampu melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi kepentingan ekonomi dan politik serta melindungi sejarah dan budayanya dari ancaman dan gangguan negara lain.

Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan *power* negara sebagai tujuan maupun instrumen, khususnya yang bersifat destruktif (*hard power*). Ketika kepentingan nasional bertujuan untuk mengejar *power* dan *power* dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensinya dalam sistem internasional yang dipersepsikan anarki kecuali kekuasaannya sendiri adalah kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang (Rachman, 2018). Hal tersebut menandakan bahwa kepentingan nasional biasanya erat kaitannya dengan *power* negara, kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang dalam hubungan internasional.

Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep lama yang ada sebagai landasan kebijakan luar negeri. Membahas relevansi kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri modern membutuhkan pemahaman

yang mendalam tentang kondisi global di era ini. Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional sebagai "kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat dalam kaitannya dengan negara berdaulat lainnya yang terdiri dari lingkungan eksternal". Lebih lanjut, Nuechterlein berpendapat bahwa ada empat aspek kepentingan nasional yang tidak saling eksklusif. Mereka adalah masalah pertahanan, ekonomi, tatanan dunia dan ideologi (Dermawan 2019).

Penulis menggunakan konsep ini untuk menganalisis mengenai bagaimana proses dan prospek hubungan bilateral yang terjadi antara Afghanistan dan Amerika Serikat di masa pemerintahan Taliban.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis adalah kualitatif. Penulis memilih metode kualitatif karena penulis ingin menggambarkan atau mendeskripsikan tentang Prospek hubungan bilateral Afghanistan – Amerika Serikat pasca rezim Ashraf Ghani. Metode ini digunakan karena sesuai dengan kebutuhan penelitian, dimana penulis ingin mendeskripsikan secara keseluruhan data yang didapatkan. Metode penelitian kualitatif juga memusatkan penelitian secara intensif kepada suatu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai sebuah kasus.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode *Library Research*. Dimana data-data yang dibutuhkan dalam penelitian didapat melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, surat kabar, maupun dari media elektronik seperti internet.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan pada fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta tersebut dikaitkan dengan fakta yang lain sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah deduktif. Dimana dalam penelitian ini penulis memaparkan secara umum mengenai kondisi negara Afghanistan dan Amerika Serikat, serta hubungan bilateral keduanya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih khusus mengenai peluang dan tantangan dalam membangun hubungan bilateral Afghanistan dan Amerika Serikat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral selalu menjadi pembahasan oleh para sarjana dan praktisi hubungan internasional yang berkaitan dengan perang dan perdamaian, konflik dan kerjasama, konsep tatanan dunia, proses integrasi regional, lembaga internasional atau kebijakan luar negeri masing-masing negara (Ludwig, 2021). Dalam membahas mengenai hubungan bilateral, terdapat beberapa hal yang turut berpengaruh dan bersinergis dalam hubungan bilateral yaitu diplomasi. Peran sentral hubungan bilateral dalam diplomasi kemudian dapat dieksplorasi melalui peran strategisnya dalam mempromosikan kepentingan nasional dan menyusun negosiasi internasional (Pannier, 2020). Dalam hal ini, praktik diplomasi dan hubungan bilateral memiliki kesamaan dalam menjalin hubungan dengan negara lain.

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena hubungan internasional menjadi hal yang penting, bahkan menjadi subjek penelitian dengan fokus pada hubungan bilateral atau hubungan antar aktor negara. Hal ini membuka perspektif penelitian hubungan bilateral baru yang relasional, yang berpusat pada proses transaksi relasional yang dinamis di antara aktor-aktor sosial, yang erat dengan lingkungan global atau hubungan internasional. Dengan kata lain, disiplin ilmu perlahan mulai menyadari bahwa hubungan tidak hanya

menjadi inti dalam menjelaskan dan memahami kehidupan global, tetapi juga pada pusat pengamatan dan penelitian terhadap objek tersebut (Ludwig, 2021). Berdasarkan perkembangan hubungan bilateral secara akademik, dapat disimpulkan bahwa secara teoritis definisi mengenai hubungan bilateral terjadi melalui proses panjang hingga definisi mengenai hubungan bilateral dapat disesuaikan dengan konteks hubungan internasional kontemporer.

Pelaksanaan hubungan bilateral pun dilakukan melalui kementerian luar negeri, kedutaan besar, dan konsulat dimana dalam menciptakan hubungan bilateral terlebih dahulu dimediasi menggunakan praktik diplomasi. Diplomasi bilateral menjadi instrument penting untuk mengejar kepentingan suatu negara, baik melalui perdagangan dan investasi, dengan mempromosikan citra dan budaya suatu negara, atau dalam berkomunikasi dengan diaspora. Hubungan bilateral cenderung disukai ketika aktor menganggapnya sebagai keuntungan taktis. Dengan demikian, hubungan bilateral sering dilakukan sebagai interaksi strategis, perebutan kekuasaan di mana para aktor didorong oleh kepentingan mereka sendiri daripada oleh keinginan untuk menjadi inklusif (Pannier, 2020). Oleh karena itu, praktik diplomasi menjadi sebuah media yang digunakan dalam menjalin hubungan bilateral yang baik antar aktor.

Hubungan bilateral sendiri memiliki istilah lain yaitu bilateralisme. Menurut T.J. Pempel, bilateralisme berarti bahwa dua negara yang menyerahkan hak istimewa tertentu mereka satu sama lain, yang tidak mereka berikan kepada negara lain dan melibatkan keyakinan normatif di antara pembuat kebijakan dari kedua negara bahwa transaksi di antara mereka dalam sebagian besar masalah harus ditangani terutama melalui hubungan pemerintah yang satu ke pemerintah yang lainnya. Bilateralisme dapat dipahami sebagai kerjasama "antara dua negara" yang bersatu untuk melakukan urusannya dalam hal-hal seperti perdagangan, keamanan, diplomasi, dan pertahanan (Qian, 2021). Dalam hal ini, eratnya hubungan antar dua negara menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan kerjasama bilateral di ruang lingkup tertentu seperti perdagangan keamanan dan sebagainya.

Secara historis dan strategis, peran hubungan bilateral menjadi inti dari hubungan internasional dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Meskipun hubungan multilateral menjadi semakin beragam dan intens terutama pada 1990-an, dan telah menjadi fokus perhatian yang berkembang dari para sarjana hubungan internasional, pengamatan maupun pembahasan mengenai hubungan bilateral tetap eksis hingga hari ini (Pannier, 2020). Intensitas dan kualitas dalam hubungan bilateral secara historis telah menjadikannya sebagai instrument penting dalam fenomena internasional

Dalam ranah hubungan internasional, bilateralisme berarti kebijakan bersama yang disepakati oleh dua negara untuk melakukannya dalam hal-hal seperti dalam perdagangan, keamanan, diplomasi dan pertahanan. Bilateralisme adalah istilah luas yang melibatkan diplomasi bilateral, aliansi keamanan bilateral serta hubungan bilateral (Qian, 2021). Oleh karena itu, konteks bilateralisme memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar kerjasama semata, akan tetapi perlu mempertimbangkan aspek lainnya.

Dalam memahami konsep hubungan bilateral, Budiono Kusumohamidjojo menyatakan hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara dua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh disebrang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan kerjasama politik, kebudayaan dan struktur ekonomi (Kelvin, 2019). Dalam artian bahwa bagaimanapun jarak diantar kedua negara, apabila suatu negara ingin menciptakan suatu hubungan tertentu dengan negara lain dan berkesinambungan maka hal tersebut telah dinamakan sebagai hubungan bilateral.

Hubungan lintas batas politik dan non-politik dari dua aktor sosial dalam sistem global adalah masalah asli kepentingan ilmiah dalam penelitian hubungan bilateral (Ludwig, 2021). Dalam hal ini, hubungan bilateral adalah hubungan politik maupun non politik antara dua aktor sosial baik negara maupun non negara yang tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat aktor selain negara yang melakukan hubungan bilateral.

Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral, misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran tumpang, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah hubungan multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri (*freewill*) (Kelvin, 2019). Oleh karena itu, dalam melakukan hubungan dengan negara lain terdapat tiga bentuk hubungan yaitu hubungan unilateral, bilateral dan multilateral.

Menurut Ludwig, hubungan bilateral tidak lagi dipahami sebagai interaksi antar Negara (terwujud) akan tetapi sebagai proses transaksi yang berkelanjutan di antara bagian-bagian dari sistem sosial yang kompleks. Masing-masing terdiri dari sub-sistem, dari dua aktor kolektif hingga individu. Selain itu, sistem bilateral saling tumpang tindih dengan dan tertanam dalam keragaman sistem sosial dan alam lainnya (Ludwig, 2021). Dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan bilateral tidak lagi dapat dipandang sebatas interaksi antar negara namun dapat dilihat sebagai sebuah sistem sosial yang kompleks.

Hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara. Hubungan tersebut meliputi hubungan di bidang-bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, hukum, dan bidang lainnya. Dimana menurut Holsty dan Azhary dalam menjalin hubungan-hubungan bilateral, terdapat variabel-variabel yang mendasari hubungan tersebut yaitu seperti :

1. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara
2. Keterampilan mengarahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan
3. Kredibilitas ancaman serta gangguan
4. Derajat kebutuhan dan ketergantungan
5. Responivitas di kalangan pembuat keputusan (Nur, 2019).

Dimana menurut Holsty, negara yang akan menjalin hubungan bilateral harus memperhatikan kondisi ekonomi, militer, Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), ketuhanan dan keamanan wilayah serta bagaimana negara tersebut memanfaatkan dan mengelolanya sehingga kedua negara tersebut dapat menjalin kerjasama bilateral sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan hal yang paling penting yang mendasari hubungan bilateral antara satu negara dengan negara yang lain.

Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai konsep yang harus diartikan sebagai kekuasaan sehingga kepentingan nasional berdasar atas definisi kekuasaan, yang berarti bahwa posisi kekuasaan yang harus dimiliki negara adalah pertimbangan utama yang memberi bentuk pada kepentingan nasional. Sementara itu, menurut Frankel, esensi kepentingan nasional merupakan nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Dengan demikian, baik kebijakan maupun rencana yang dimaksud

berorientasi pada kepentingan nasional. Dalam praktik sebenarnya, kepentingan nasional tidak hanya diciptakan oleh seorang negarawan tetapi juga dapat diciptakan oleh negarawan lain yang percaya bahwa negara hanyalah alat untuk memenuhi kebutuhan warganya. Keduanya dapat membuat interpretasi yang sama tentang kepentingan nasional, selama negara benar-benar bertanggung jawab atas kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan nasional warganya (Indrayani, 2022). Dalam hal ini, kepentingan nasional menjadi aspek penting dalam interaksi antar negara, baik dari perspektif kekuasaan dimana superioritas suatu negara dapat membentuk kepentingan negaranya, maupun dari perspektif nilai fundamental – kebijakan berdasar pada nilai dasar suatu negara.

Dengan adanya hubungan bilateral yang terjalin antar negara, maka hal tersebut dapat melahirkan kerjasama internasional. Menurut Bagaskara, kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk memenuhi kepentingan negara-negara di dunia (Bagaskara, 2018). Oleh karena itu, semakin baik hubungan bilateral yang terjalin oleh suatu negara maka tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama internasional dapat berjalan dengan lebih baik kedepannya dimana kerjasama internasional dapat berupa kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.

B. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah konsep utama dalam hubungan internasional. Semua bangsa selalu terlibat dalam proses memenuhi atau mengamankan tujuan kepentingan nasional mereka. Ini adalah hak yang diterima secara universal dari setiap negara untuk mengamankan kepentingan nasionalnya (Suwarman et al., 2018). Alasan dibalik kebijakan luar negeri suatu negara adalah hanya kepentingan nasional yang ingin dicapai, baik melalui cara yang sifatnya konstruktif maupun desktruktif.

Konsep kepentingan nasional menjadi kata kunci paling penting bagi penganut pendekatan realisme yang memang sangat percaya pada “kedaulatan negara” sebagai satu-satunya aktor/entitas dalam HI. Secara lebih luas, istilah “kepentingan nasional” juga terutama muncul dalam dokumen-dokumen kebijakan di berbagai kementerian, terutama kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan, serta menjadi salah satu doktrin yang memandu pelaksanaan politik luar negeri di banyak negara (Umar, 2014). Hal tersebut berangkat dari kepentingan nasional yang dapat didefinisikan sebagai tujuan jangka panjang dan berkelanjutan secara umum yang oleh negara, bangsa dan pemerintah melihat diri mereka sebagai pelayan. Kepentingan nasional suatu negara berakar pada kesadaran sosial dan identitas budaya rakyat (Sehou, 2021).

Kepentingan nasional merupakan salah satu konsep lama yang ada sebagai landasan kebijakan luar negeri. Membahas relevansi kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri modern yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang kondisi global kontemporer. Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional sebagai "kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat dalam kaitannya dengan negara berdaulat lainnya yang terdiri dari lingkungan eksternal". Lebih lanjut, Nuechterlein berpendapat bahwa ada empat aspek kepentingan nasional yang tidak saling eksklusif. Mereka adalah masalah pertahanan, ekonomi, tatanan dunia dan ideologi (Dermawan, 2020). Oleh karena itu, keempat aspek tersebut perlu diperhatikan dalam menjaga eksistensi kepentingan nasional negara dalam hubungan bilateral yang tercipta dari para aktor yang bersangkutan.

Menurut Scott Burchill, kepentingan nasional merupakan motivasi dari negara dalam menjalankan kebijakan eksternal (hubungan luar negeri). Pada intinya, banyak ilmuwan menggunakan gagasan atau konsep tersebut untuk menggambarkan alasan, motivasi atau justifikasi utama yang mendasari perilaku suatu negara dalam lingkungan global (Bakry 2017). Adapun menurut James N. Rosenau, kepentingan nasional dalam neorealis mengacu pada pilihan dimana setiap negara menetapkan cara yang terbaik untuk mendapatkan kepentingannya. Kepentingan nasional merupakan kepentingan utama (*primary interests*). Sebuah kepentingan negara yang bertujuan untuk

melindungi keamanan negara juga termasuk sebagai kepentingan utama (Maka, 2017). Dalam hal ini, kepentingan nasional adalah satu-satunya aspek penting yang harus diprioritaskan dalam menjalankan hubungan bilateral dengan negara lain ataupun dalam membangun relasi dengan negara lain.

Misalnya, Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional didefinisikan sebagai kekuasaan dan bahwa negarawan harus berpikir dan bertindak di sepanjang arah itu. Waltz melihat kepentingan nasional sebagai maksimalisasi kekuasaan. Adapun menurut Pearson dan Rochester dan Papp percaya bahwa sebagai sebuah konsep, kepentingan nasional bersifat ambigu dan oleh karena itu berkonotasi dengan beberapa hal, sementara Hartmann mendefinisikannya sebagai sesuatu yang dapat dilakukan suatu negara untuk dapat melindungi negara dari negara lain maupun mencapai hal tersebut dengan negara lain (Ota & Ecoma, 2022). Namun, dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan keterkaitan antara kekuasaan dan hubungan relasinya dengan negara lain. Dalam artian bahwa kepentingan nasional berhubungan erat dengan kekuasaan yang perlu dicapai oleh kepala negara dan antar negara itu sendiri.

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi serta mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan tersebut para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap

negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik (Pandapotan, 2019). Dalam teori kepentingan nasional, Morgenthau menjelaskan bahwa suatu negara harus memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kepentingan nasional negaranya, dimana dalam memenuhi kepentingan tersebut suatu Negara harus mampu melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi kepentingan ekonomi dan politik serta melindungi sejarah dan budayanya dari ancaman dan gangguan negara lain.

Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan *power* negara sebagai tujuan maupun instrumen, khususnya yang bersifat destruktif (*hard power*). Ketika kepentingan nasional bertujuan untuk mengejar *power* dan *power* dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, maka konsekuensinya dalam sistem internasional yang dipersepsikan anarki kecuali kekuasaannya sendiri adalah kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang (Rachman, 2018). Hal tersebut menandakan bahwa kepentingan nasional biasanya erat kaitannya dengan *power* negara, kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang dalam hubungan internasional.

Menurut Hartmann, kepentingan nasional dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu kepentingan nasional inti atau vital, kepentingan sekunder atau tersier, dan kepentingan nasional umum. Kepentingan nasional inti atau vital, adalah kepentingan nasional yang biasanya bersedia diperjuangkan oleh suatu

negara dengan segera atau pada akhirnya seperti perlindungan dan pertahanan wilayah negara, kesejahteraan warga negara, serta kriteria ideologis. Kepentingan nasional sekunder adalah kepentingan nasional yang dianggap diinginkan oleh negara tetapi belum tentu layak diperjuangkan. Hal Ini mencakup perlindungan warga negara yang secara legal tinggal di luar negeri, dan perlindungan kepentingan yang kebetulan, seperti afinitas budaya atau masalah etnis, agama, dan rasial. Adapun kepentingan nasional umum mengacu pada perkembangan-perkembangan dalam sistem internasional yang berdampak pada masing-masing negara sebagai anggota komunitas bangsa-bangsa. Hal ini termasuk pada kepatuhan terhadap aturan yang mengatur hubungan antar-negara, serta peran yang diharapkan dari negara-negara tertentu. Artinya, negara-negara tidak hanya menuntut sistem internasional tetapi juga berutang beberapa tugas kepada sistem global, kegagalan yang dapat berdampak negatif pada sistem (Ota & Ecoma, 2022). Oleh karena itu, perlu diketahui ketiga karakteristik tersebut untuk mengidentifikasi jenis dari kepentingan nasional suatu negara secara umum.

Namun, sejak berakhirnya era kolonisasi dan perang dingin, era baru telah memunculkan kekuasaan aktor non negara, yaitu manusi asecara individu maupun kolektif. Kepentingan nasional negara yang bersifat egois dan agresif tergantikan dengan kepentingan yang bersifat individualis sekaligus altruistic dan persuasif yang non-destruktif. Konsekuensinya adalah

keberadaan diplomasi *soft power* yang memunculkan ragam diplomasi yang memberdayakan publik individu kedalam ragam bentuk persuasi yang menarik secara populer pada tingkat non-negara dan sub-negara (Rachman, 2018). Secara singkat, dapat dikatakan bahwa adanya perubahan era dalam hubungan internasional turut mempengaruhi interaksi antar negara yang sebelumnya bersifat egois berubah ke arah yang lebih diplomatis dan individual.